



Strategi Dan Mekanisme Teori Kebijakan Moneter

Andriani Maghfiroh F.S^{1*}, Yanuar Imam Ardiansyah², Rini Puji Astuti³

^{1,2,3}Program Studi Perbankan Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹viu.19111999@gmail.com, ²yanuarimamardiansyah@gmail.com, ³rinipuji.astuti111983@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus mengalami pasang surut membutuhkan pengelolaan dan kebijakan yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara adalah dengan menggunakan kebijakan moneter (*monetary policy*). Kebijakan moneter merupakan ilustrasi kebijakan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dengan tujuan utama adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter juga sebagai senjata untuk mengatur jalannya perekonomian dan khususnya mengendalikan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan yaitu dengan beberapa instrumen kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tetap stabil maka itu tidaklah mudah jika tidak diikuti oleh kemampuan variabel makroekonomi. Fokus kebijakan moneter dalam stabilitas harga kurang memperhitungkan risiko akibat interaksi sistem keuangan dengan makroekonomi dan *macrofinancial linkages*. Penggunaan kebijakan moneter berdasar pada *Inflation Targeting Framework* memang menunjukkan keberhasilan dengan menurunkan tingkat inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi serta menekan tingkat suku bunga, kondisi seperti ini sangat memungkinkan munculnya pertumbuhan kredit berlebih yang menjadi penyebab munculnya moral hazard para pelaku bisnis.

Kata Kunci: Kebijakan moneter, strategi moneter, mekanisme moneter

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemajuan. Jika perekonomian suatu negara stabil, dapat dikatakan negara tersebut merupakan negara maju, dan sebaliknya jika perekonomian didalam suatu negara terpuruk maka negara tersebut masih belum dapat dikatakan negara maju. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan perekonomian suatu negara harus meningkat setiap tahunnya.¹ Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus mengalami pasang surut tersebut membutuhkan pengelolaan dan kebijakan yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara adalah dengan menggunakan kebijakan moneter (*monetary policy*). Kebijakan moneter merupakan ilustrasi kebijakan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dengan tujuan utama adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter juga sebagai senjata untuk mengatur jalannya perekonomian dan khususnya mengendalikan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan yaitu dengan beberapa instrumen kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tetap stabil maka itu tidaklah mudah jika tidak diikuti oleh kemampuan variabel makroekonomi.

Fokus kebijakan moneter dalam stabilitas harga kurang memperhitungkan risiko akibat interaksi sistem keuangan dengan makroekonomi dan *macrofinancial linkages*. Penggunaan kebijakan moneter berdasar pada *Inflation Targeting Framework* memang menunjukkan keberhasilan dengan menurunkan tingkat inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi serta menekan tingkat suku bunga, kondisi seperti ini sangat memungkinkan munculnya pertumbuhan kredit berlebih yang menjadi penyebab munculnya moral hazard para pelaku bisnis.² Adanya persepsi para pelaku pasar yang menganggap bahwa seluruh kondisi makroekonomi sudah dijamin bank sentral mendorong aktivitas ekspansi terhadap pembelian aset risiko dengan profit yang tinggi. Pengembangan kebijakan lain dilakukan sebagai solusi dalam mengatasi ketidakseimbangan keuangan salah satunya melalui kebijakan makroprudensial. Keberadaan kebijakan makroprudensial sebagai alat bagi negara dan bank sentral untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan.³ Kebijakan moneter sebagai suatu kebijakan yang dijalankan oleh otoritas moneter untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil serta harga melalui mekanisme transmisi, jalur transmisi moneter yang dimiliki setiap negara akan berbeda di Indonesia terdapat 6 jalur

¹ Mankiw, G. N. (2003). Teori Makro Ekonomi. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga

² Berg, Hallsten, Heideken, & Soderstrom, 2013

³ Morgan & Pontines, 2014

transmisi kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter meliputi jalur suku bunga, jalur agregat moneter, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset dan jalur ekspektasi. Penerapan kebijakan moneter akan bergantung pada kondisi perekonomian negara, terdapat 2 jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif.

Pada kebijakan moneter yang bersifat ekspansif akan diterapkan sebagai upaya moneter dalam mendorong perekonomian melalui peningkatan JUB yang ada di masyarakat sedangkan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif akan diterapkan dalam memperlambat perekonomian dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan Makroprudensial sebagai sebuah kebijakan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai upaya dalam meredam kemungkinan munculnya risiko sistemik yang akan mengganggu sistem keuangan. Kebijakan Makroprudensial mulai berkembang setelah terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008 atau lebih dikenal dengan "Subprime Mortgage" dengan meningkatkan ekspansi perekonomian melalui penyaluran kredit. Kebijakan Makroprudensial akan sangat berguna bagi bank sentral sebagai alat untuk mengontrol tingkat kesehatan sistem keuangan negara.⁴ Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, transmisi kebijakan moneter tidak hanya mempengaruhi perbankan konvensional saja, namun juga mempengaruhi perbankan syariah, karena mekanisme transmisi dapat juga melewati jalur syariah. Instrumen kebijakan moneter ganda juga tidak terbatas hanya menggunakan suku bunga saja, tetapi dapat pula menggunakan bagi hasil atau margin atau fee. Dengan demikian, dalam sistem moneter ganda, *interest rate pass-through* lebih tepat disebut *policy rate pass-through*, dimana *policy rate* untuk konvensional menggunakan suku bunga, sedangkan *policy rate* untuk syariah dapat menggunakan bagi hasil, margin, atau fee.

METODE

Pada penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti terdahulu menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya.⁵ Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.⁶ Langkah yang dilakukan ialah dengan melakukan observasi. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung objek yang ada, tidak hanya terbatas hanya pada manusia saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengacu pada kontrol bank sentral terhadap jumlah uang beredar dan peredaran uang, dengan tujuan mencapai keseimbangan domestik (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pembangunan yang merata) dan keseimbangan eksternal (neraca pembayaran). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework (ITF) sejak 1 Juli 2005. Dalam kerangka tersebut, inflasi menjadi sasaran yang diutamakan. Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan kebijakan moneter guna memperkuat efektivitasnya. Hal ini dilakukan agar Bank Indonesia dapat menangani dinamika dan tantangan perekonomian yang terus berubah. Sebagai lembaga yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

a. Teori Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yaitu salah satu cara yang digunakan Negara dalam mengendalikan serta mengarahkan keadaan ekonomi makro yang sesuai atau yang lebih baik dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu Negara. Keadaan yang dimaksudnya ialah meningkatkan kesetimbangan serta pemeliharaan stabilitas harga, dengan adanya kebijakan ini pemerintah bisa menambah, mengurangi serta mempertahankan sejumlah uang yang menyebar pada suatu pemerintahan. Kebijakan moneter berfungsi sebagai kunci untuk memperoleh strategi yang baik dari ekonomi makro di sebuah Negara untuk menanggulangi terjadinya inflasi.

Otoritas moneter memiliki pengaruh yang relevan jika tidak langsung pada tingkat harga di suatu negara dan kemana nilai tukarnya. Otoritas moneter mengerjakan ini melalui keahlian mereka untuk

⁴ Nakatami, 2020

⁵ Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003

⁶ Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. (2010). Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.

mengontrol banyak uang beredar, mempengaruhi suku bunga, aliran kredit dan perkembangan sektor keuangan ekonomi. Trik lain adalah bank sentral menetapkan tingkat bunga yang harus dibayar atas deposito bank dan menentukan persentase saham yang dapat dipinjamkan. Dalam beberapa kasus, kegiatan penegakan kebijakan bank sentral telah berkembang dalam jangka waktu yang lama. Berikut ada beberapa artikel penelitian terdahulu yang membahas tentang ini sebagai narasi ilmiah untuk bahasan ini .

- Pertama, yaitu artikel yang berjudul “kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi islam ” yang disusun oleh Ahmad Fuad. Dimana artikel ini menjelaskan bahwa Sistem moneter dalam islam mempunyai ciri khas yang khusus dengan sistem ekonomi konvensional, karena pada manajemen pengelolaannya yang tidak menggunakan istilah bunga sehingga ini yang membuat perbedaan utama dari ekonomi konvensional.⁷
- Kedua, artikel yang berjudul “ Kebijakan Moneter Syariah ” yang disusun oleh Luqmanul Hakiem Ajuna. Dimana artikel ini menjelaskan bahwa keberhasilan ekonomi di suatu negara tercermin dalam kebijakan moneternya. Kebijakan moneter ini dibuat dari respons ekonomi mikro yang didorong oleh pembuat kebijakan moneter tingkat makro. Kebijakan moneter ini juga harus sesuai dengan syariat agar ekonomi tumbuh berkah Allah.⁸

b. Strategi dan Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Strategi Kebijakan Moneter Strategi kebijakan moneter merupakan bagian kebijakan makro yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas nilai mata uang. Apabila stabilitas kegiatan ekonomi terganggu, maka salah satu kebijakan yang bisa digunakan adalah kebijakan moneter untuk memulihkannya dengan serangkaian tindakan stabilisasi. Ada beberapa penyebab kegagalan dalam pengendalian stabilitas nilai uang yaitu adanya ketidakstabilan penggada uang, velositas jumlah uang yang beredar, sampai dengan perubahan paradigma mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kerangka strategis kebijakan moneter pada dasarnya terkait dengan penetapan tujuan akhir kebijakan moneter dan strategi untuk mencapainya.⁹ Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh kebijakan moneter lebih terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, untuk mencapai tujuan tersebut adapun strategi kebijakan moneter diantaranya :

1. Penargetan nilai tukar Terdapat tiga alternatif dalam penargetan nilai tukar sebagai strategi pelaksanaan kebijakan moneter. Pertama, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional, seperti emas (standar emas). Kedua, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Ketiga, dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu, ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara (*crawling peg*).
2. Penargetan besaran moneter Pada banyak negara, penargetan nilai tukar bukan menjadi pilihan utama dari strategi kebijakan moneter karena tidak ada suatu negara yang mata uangnya secara meyakinkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan strategi kebijakan oleh negara lain. Untuk itu, beberapa negara lebih memilih penargetan besaran moneter, yaitu dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara, misalnya, uang beredar dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2), serta kredit. Kelebihan utama dari penargetan besaran moneter dibandingkan dengan penargetan nilai tukar adalah dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan seperti laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
3. Penargetan inflasi Dengan melemahnya hubungan antara besaran moneter dan sasaran akhir dari kebijakan moneter, banyak negara mulai mengadopsi penargetan inflasi dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dengan mentargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, bank sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir.

c. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktifitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Secara sederhana MTKM merupakan tahapan-tahapan yang dilalui

⁷ Fuad, Ahmad, ‘Kebijakan Moneter Islam’, Jurnal Syariah, 8.1 (2020), 1–24

⁸ Ajuna, Luqmanul Hakiem, ‘Kebijakan Moneter Syariah’, Al-Buhuts, 13.1 (2017), 104–7

⁹https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9478/1/63020160147_Khoir%2520Umi%2520Laksana.pdf&ved=2

kebijakan moneter mulai rumusan kebijakan moneter menuju tujuan akhir yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter berjalan dengan baik apabila saluran transmisi yang dilewati (MTKM) berjalan dengan lancar. Terdapat dua pendekatan kebijakan moneter yaitu pendekatan kuantitas (sasaran multi) dan pendekatan harga (penargetan inflasi). Pendekatan kuantitas merupakan paradigma lama dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter yang membuat Bank Sentral harus membagi konsentrasi mengenai sasaran kebijakan.¹⁰

Paradigma ini menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran sebagai sasaran kebijakan moneter. Pendekatan kuantitas beranggapan bahwa pengendalian besaran-besaran moneter dapat mengendalikan stabilitas perekonomian. Berbeda dengan pendekatan harga yang berkonsentrasi pada satu sasaran, yaitu stabilitas harga. Stabilitas harga yang dimaksud adalah inflasi yang rendah dan stabil dalam jangka panjang. Walaupun pendekatan harga hanya berkonsentrasi pada stabilitas harga, bukan berarti pertumbuhan ekonomi tidak menjadi concern dari Bank Sentral. Justru dengan rendah serta stabilnya inflasi dalam jangka panjang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹¹

d. Efektifitas Kebijakan Moneter

Efektifitas kebijakan moneter yaitu sejauh mana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral (apapun bentuknya) memberi dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat, dalam arti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat meningkatkan kesempatan kerja, dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, serta memberi pengaruh pada kebijakan makro lainnya. Efektifitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan dapat dipantau berdasarkan beberapa parameter penting yang tidak secara langsung dikontrol oleh bank sentral. Parameter tersebut seperti elastisitas penawaran, permintaan aset keuangan dan aset riil termasuk juga suku bunga deposito dan kredit relatif lebih banyak dipengaruhi oleh struktur sistem keuangan seperti kondisi dan tingkat kecanggihan pasar uang, kompetisi, dan ketersediaan alternatif sumber pembiayaan lainnya.¹²

• Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Kebijakan Moneter

1. Laju Inflasi. Terkendali Laju inflasi yang terkendali akan memengaruhi efektifitas kebijakan moneter. Bila inflasi tinggi, bank kesulitan untuk mengerahkan dana masyarakat. Inflasi yang tinggi mengakibatkan tingkat bunga riil menjadi menurun. Dengan demikian keinginan masyarakat untuk menyimpan kekayaannya dalam produk-produk perbankan juga akan menurun.
2. Suku Bunga pada Tingkat Wajar. Suku bunga yang berada pada tingkat wajar akan memengaruhi efektifitas kebijakan moneter. Jika suku bunga tinggi, para pengusaha tidak tertarik lagi untuk mengambil kredit. Akibatnya dana yang sudah terlanjur masuk perbankan dengan suku bunga tinggi tersebut tidak dapat tersalurkan dan menimbulkan permasalahan baru pada perbankan. Selanjutnya perbankan terancam akan menghadapi masalah likuiditas, karena itulah suku bunga harus berada pada tingkat yang wajar
3. Nilai Tukar Rupiah Realistis. Nilai tukar yang realistis tentu memberi kepastian bagi semua pelaku usaha, termasuk sektor perbankan, dunia usaha, dan masyarakat. Nilai tukar rupiah yang rendah dapat memicu peningkatan permintaan kredit dari dunia usaha. Hal itu mereka lakukan untuk melanjutkan dan meningkatkan produk ekspornya. Dengan begitu tentu akan menguntungkan dunia perbankan.
4. Ekspektasi Masyarakat terhadap Moneter Positif. Ekspektasi masyarakat mendapat perhatian besar dalam pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Peran faktor ini terhadap tingkat inflasi dan nilai tukar yakni dapat mendorong naiknya harga-harga. Sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan di ekspor.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemajuan. Jika perekonomian suatu negara stabil, dapat dikatakan negara tersebut merupakan negara maju, dan sebaliknya jika perekonomian didalam suatu negara terpuruk maka negara tersebut masih belum dapat dikatakan negara maju. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan perekonomian suatu negara harus meningkat setiap tahunnya. Kebijakan moneter merupakan ilustrasi kebijakan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dengan tujuan utama adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter juga sebagai senjata untuk mengatur jalannya perekonomian dan khususnya mengendalikan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan yaitu dengan beberapa instrumen kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tetap stabil maka itu tidaklah mudah jika tidak diikuti oleh kemampuan variabel makroekonomi. Tujuannya ialah : 1. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah: Menjaga nilai rupiah terhadap mata uang asing agar tidak terlalu fluktuatif, sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor dan impor. 2. Mencapai dan memelihara stabilitas sistem pembayaran: Menjamin

¹⁰ Ascarya. (2002). Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

¹¹ www.bi.go.id

¹² Miller, Rogger LeRoy. VanHoose, David D. (2004)

kelancaran dan efisiensi sistem pembayaran nasional, sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan. 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan: Mencegah terjadinya krisis keuangan dengan menjaga kesehatan dan ketahanan sistem keuangan. 4. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan: Menciptakan kondisi makroekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh jajaran pimpinan perbankan beserta para karyawan. Terimakasih kami ucapkan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah membantu dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajuna, Luqmanul Hakiem, 'Kebijakan Moneter Syariah', Al-Buhuts, 13.1 (2017), 104–7
- Ascarya. (2002). Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia - Kebijakan Moneter
- Berg, C., Hallsten, K., Heideken, V. ., & Soderstrom, U. (2013). Two Decades of Inflation Targeting : Main Lesson and Remaining Challenges. Sveriges Riskbank Economic Review.
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. Journal of US-China Public Administration, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003
- Fuad, Ahmad, 'Kebijakan Moneter Islam', Jurnal Syariah, 8.1 (2020), 1–24
- Mankiw, G. N. (2003). Teori Makro Ekonomi. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Miller, RoggerLeRoy. VanHoose, David D. (2004). Money, banking and Financial Markets, Second Edition. South-Western Thomson Learning. Ohio, United States
- Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. (2010). Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
- Morgan, P., & Pontines, V. (2014). Financial Stability and Financial Inclusion. SSRN Electronic Journal, (January). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2464018>
- Nakatami, R. (2020). Macroprudential Policy and the Probability of a Banking Crisis. Journal of Policy Modeling, 6624, 1–18. www.bi.go.id
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://erepository.perpus.iainsaatiga.ac.id/9478/1/63020160147_Khoir%2520Umi%2520Laksana.pdf&ved=2